



**KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI
PANCER DI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER**

*Institutional in Managing Pancer Beach in Puger Kulon Village Jember
Regency*

SKRIPSI

Oleh:

SITI ZULAIKHA MUBAROK

NIM 120910201073

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI
PANCER DI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER**

*Institutional in Managing Pancer Beach in Puger Kulon Village Jember
Regency*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara jurusan Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

SITI ZULAIKHA MUBAROK

NIM 120910201073

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengaharap ridho dan karunia dari Allah swt, dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Yatimin, Ibunda Sugiarti dan Kakak-Kakakku Eko Prasetyo Arfan Faluqi, Ahmad Rizky Sefta Jumala, serta keluarga yang telah berdoa dan memberikan dukungan tiada henti bagiku;
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman; dan
4. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(Q.S An-Najm ayat 39)¹

“Jangan pernah takut mencoba. Kegagalan tidak datang karena kamu jatuh, namun kegagalan datang karena kamu tidak berdiri setelah jatuh ”

(Deddy Corbuzier)²

¹ *Q.S An-Najm ayat 39*

² *Deddy Corbuzier*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zulaikha Mubarok

NIM : 120910201073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan untuk institusi lain, dan bukanlah karya hasil menjiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang menyatakan:

Siti Zulaikha Mubarok

NIM 120910201073

SKRIPSI

**KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI
PANCER DI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER**

*(Institutional in Managing Pancer Beach in Puger Kulon Village Jember
Regency)*

Oleh:

Siti Zulaikha Mubarok

NIM. 120910201073

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing II : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kelembagaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Siti Zulaikha Mubarak NIM 12091020104673 telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

jam :

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Pembimbing Utama,

Drs. Anwar, M.Si
196306061988021001

Anggota I,

Pembimbing Anggota,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
1974100720001200

Anggota II,

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M.Si
195808101987021002

RINGKASAN

Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember; Siti Zulaikha Mubarok; 120910201073; 2019; 77 Halaman; Program Studi Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Pemerintah Desa memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pengembangan kepariwisataan. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian baik itu bagi negara dan daerah yaitu berupa devisa, pajak dan retribusi. Keberhasilan kepariwisataan diperlukan kepandaian dalam mengelola asset pariwisata yang ada, baik asset berbentuk kekayaan alam dan budaya. Pariwisata mempermudah daerah dalam mengembangkan potensi dan objek yang terdapat didalam daerah tersebut. Pantai Pancer merupakan objek wisata Pantai Puger mampu bersaing dengan objek wisata lain dan dapat dijadikan sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Jember khususnya di Desa Puger Kulon. Pantai Pancer adalah sebuah pantai yang berada di Kabupaten Jember tepatnya di desa Puger Kulon

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Hubermann yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam mendeskripsikan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten

Jember peneliti mengukur Pengelolaan pantai pancer yang menjadi salah satu prioritas desa puger kulon, karena sangat mempengaruhi meningkatnya pendapatan desa puger kulon. Dilihat dari struktur pengelolaan objek wisata pantai pancer, pemerintah desa menunjuk salah satu koordinator untuk menghendel kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pantai pancer bersama dengan kelompok masyarakat menerapkan fungsi fungsi dari pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam perencanaannya pemerintah puger kulon merencanakan pengelolaan pantai pancer dan kelompok masyarakat memiliki peran melaksanakan pengelolaan pantai pancer dalam hal promosi daya tarik objek wisata pantai pancer, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan bersama – sama, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat puger kulon. Sehingga pengelolaan objek wisata pantai puger berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan pantai puger peran kades sangatlah berpengaruh dan didukung oleh koordinator pengelola pantai pancer dan masyarakat sekitar.

Kepala desa sangat berperaan dalam pengembangan wisata pantai pancer puger, hal tersebut telah dijelaskan di atas bahwa pantai puger belum masuk dalam perkembangan objek wisata kabupaten sehingga semua perkembangan yang ada di pantai puger di lakukan oleh kepala desa. Pada era sekarang kepala desa melakukan rencana perkembangan pembangunan fasilitas seperti halnya perbaikan jalan. Dulu untuk mengakses pantai pancer tidaklah sulit. Untuk menuju pantai puger dapat di akses menggunakan roda dua maupun roda empat, yang dulunya pantai pancer hanyalah dapat di akses menggunakan roda dua. Selain perkembangan jalan yang di perbaiki oleh pemerintah desa. Kepala desa juga banyak melakukan perubahan untuk pantai puger. Pada tahun 2016 kepala desa melakukan penghijauan di pantai pancer untuk mengurangi abrasi laut.

Pengelolaan pariwisata pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Desa melainkan merupakan tanggungjawab dari masyarakat, karena selain dapat berdampak positif bagi pengentasan suatu kemiskinan juga

dapat menambah devisa Negara sehingga penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional yang meliputi nilai-nilai formal dan nilai-nilai non formal. Nilai formal yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2005-2019 menunjukkan bahwa pantai Pancer di Desa Puger Kulon tidak termasuk wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Berikut disajikan data pengembangan daerah wisata berdasarkan RIPPDA 2005-2019 Pemerintah Kabupaten Jember yang didalamnya tercantum bahwa pantai pancer dikelola oleh pemerintah desa puger kulon, sedangkan nilai-nilai non formal yaitu nilai ekonomi yang melihat dari sisi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mampu memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat, nilai kebersamaan melihat dari segi gotong royong pemerindah desa dan masyarakat untuk mengelola dan menjaga pantai pancer, nilai budaya melihat dari sisi kebudayaan masyarakat puger untuk mengenalkan budaya desa puger kulon kepada mancanegara. Salah satu budaya yang ada desa puger kulon yaitu petik laut yang setiap tuhnnya di laksanakan di pantai pancer. Nilai kesopanan mempunyai hakikat berupa kepatutan, kepantasan serta kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sekitas dan juga biasanya nilai kesopanan disebut juga sebagai tata krama, sopan santun dan adat istiadat. Masyarakat pugerkulon dengan pemerintah desa serta organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pantai pancer selalu menjunjung nilai sopan santun sehingga dalam hubungan untuk mengelola pantai pancer bisa berjalan dengan baik.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Kedua Dosen Pembimbing, Dr. Sutomo, M.Si dan M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara;

8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait penelitian skripsi ini yaitu; Bapak Nur Hasan selaku Kepala Desa Puger Kulon, Bapak Mulyo Cahyono selaku Ketua Pokdarwis dan Puger Bagus Bapak Bapak Yanto selaku ketua Karang Taruna Generasi Muda Gedangan dan para narasumber yang tidak dapat dijabarkan satu-persatu;
9. Terimakasih kepada Devi Citra Sari, Vella Rosita, Indah Lestari, Viko Verdiansyah yang telah membantu dalam proses penelitian, penulisan, dan penyelesaian skripsi ini;
10. Teman seperjuangan yakni Anis Lestarini yang telah memberikan semangat dan bersedia untuk diajak berdiskusi terkait penulisan skripsi;
11. Sahabat yakni Galuh Trisda Frisqia Ningrum dan Okky Furi Febriyana yang telah bersedia menjadi tempat berbagi;
12. Teman baik Ari, Arif, Wildan, Titis, Yunita, Huda, Ardi, Iwan, Sisil, yang selalu memberikan semangat dan senyuman kepada penulis;
13. M. Anggik Ariyadinata yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Penulis

Siti Zulaikha Mubarak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Dasar	12
2.2 Konsep Desa dan Pariwisata	12
2.2.1 Pengertian Desa.....	12
2.2.2 Pengertian Pariwisata	14
2.3 Konsep Pariwisata dan Pengelolaan	16
2.3.1 Model Pengelolaan Berbasis Komunitas.....	23
2.4 Konsep Kelembagaan.....	26
2.4.1. Dinisi Kelembagaan	26

2.4.2. Aspek Kelembagaan	25
2.4.3. Lapis Kelembagaan	30
2.5 Kerangka Berpikir	31
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Penentuan Informan Penelitian	35
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	36
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	38
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data.....	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Gambaran /umum Kecamatan Puger	42
4.1.2 Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer	45
4.1.3 Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer	52
4.1.4 Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pancer	62
4.2 Pembahasan	71
BAB 5. PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

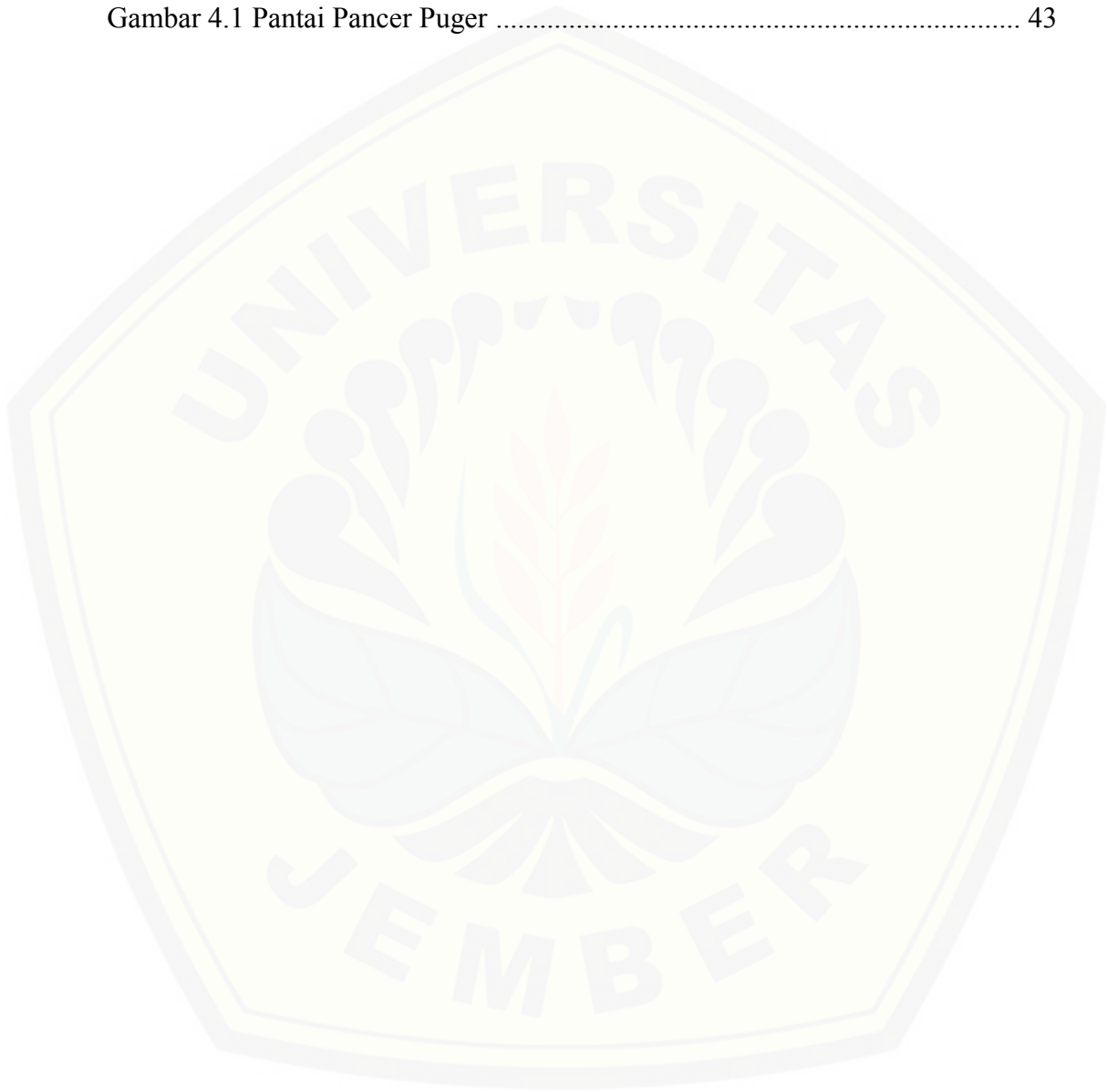
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Jember tahun 2012 – 2016	7
Tabel 1.2 APBD Desa Puger Kulon Tahun 2016	8
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	45
Tabel 4.2 Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata di Kab. Jember	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	40
Gambar 4.1 Pantai Pancer Puger	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Puger
- Lampiran 4 Peraturan Tentang Desa
- Lampiran 5 Peraturan Tentang Pariwisata
- Lampiran 6 Rencana Induk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi Observasi dan Wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Pemerintah Desa memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pengembangan kepariwisataan. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian baik itu bagi negara dan daerah yaitu berupa devisa, pajak dan retribusi. Keberhasilan kepariwisataan diperlukan kepandaian dalam mengelola asset pariwisata yang ada, baik asset berbentuk kekayaan alam dan budaya. Pariwisata mempermudah daerah dalam mengembangkan potensi dan objek yang terdapat didalam daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait kepariwisataan yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurut undang-undang ini, pada pasal 30 Pemerintah daerah/kota mempunyai kewenangan 1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; 3) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; 4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; 5) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; 6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; 8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; 9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; 10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; 11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sejalan dengan hal diatas, dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota kepada Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa yaitu: 1) bidang pertanian dan ketahanan pangan; 2)

bidang pertambangan dan energy serta sumber daya mineral; 3) bidang perhutanan dan perkebunan; 4) bidang perindustrian dan perdagangan; 5) bidang koperasi dan udaha kecil dan menengah; 6) bidang penanaman modal; 7) bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 8) bidang kesehatan; 9) biang pendidikan; 10) bidang sosial; 11) bidang penataan ruang; 12) bidang pemukiman / perumahan; 13) bidang pekerjaan umum; 14) bidang perhubungan; 15) bidang lingkungan hidup; 16) bidang politik dalam negeri dan administrasi public; 17) bidang otonomi desa; 18) bidang perimbangan keuangan; 19) bidang tugas pembantuan; 20) bidang pariwisata; 21) bidang pertahanan; 22) bidang kependudukan dan catatan sipil; 23) bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum; 24) bidang perencanaan; 25) bidang penerangan / komunikasi dan informasi; 26) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 27) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 28) bidang pemuda dan olah raga; 29) bidang pemberdayaan masyarakat desa; 30) bidang statistik; dan 31) bidang arsip dan perpustakaan.

Sektor wisata dapat berperan dalam menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta memicu munculnya industri seperti restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan dan jasa. Industri pariwisata juga memberikan kontribusi langsung terhadap sektor lain berupa usaha-usaha pembuatan dan perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, program kebersihan dan kesehatan. Sektor pariwisata memacu dan memberikan kontribusi kepada pelaksanaan proyek-proyek pada berbagai sektor di negara-negara berkembang dan maju (Pendit,1994).

Menurut Salah Wahab (1996:103) pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan industri. Pariwisata merupakan sebuah industri yang kompleks, sektor ini dapat berfungsi sebagai katup pengaman atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang makin serius di masa-masa mendatang. Di samping itu, perkembangan sektor pariwisata selain sebagai penghasil devisa negara juga memberikan

keuntungan kepada daerah, serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata. Pengelolaan wisata dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun negara. Pengelolaan memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Pengelolaan terhadap pariwisata dirasa perlu dilakukan oleh pemerintah daerah karena dipandang memiliki prospek yang baik untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Hadinoto (1996:15) destinasi wisata merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, ia dapat tinggal selama waktu tertentu. Terdapat pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah khususnya urusan pariwisata.

Secara umum pengembangan Obyek Wisata dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu:

a. Karakteristik Obyek Wisata

Karakteristik suatu obyek berpengaruh pada pasar wisatawan, dimana wisatawan akan memperhatikan karakteristik obyek yang ada untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut. Selain itu, dalam melakukan aktivitas wisatawan membutuhkan sajian berupa atraksi wisata yang unik/indah dan menarik.

b. Akseibilitas

Kemudahan pencapaian merupakan aktor penting bagi suatu obyek agar dikunjungi, semakin tinggi pula intensitas kunjungan wisatawan. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pencapaian ke obyek-obyek wisata tersebut.

c. Pengelolaan Obyek Wisata

Wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata di suatu daerah , tentu sangat membutuhkan informasi tentang obyek wisata , sarana akomodasi, dan rute wisata yang dapat di tempuh . Untuk itu diperlukan sarana informasi wisata yang cukup

Pengelolaan pariwisata adalah salah satu bagian manajemen yang menitik beratkan pada implementasi potensi budaya harus dilaksanakan dengan rentang

waktu, berupa langka sistematis yang dapat mengarah pada pencapaian hasil, dan hasil yang dicapai diharapkan pada perencanaan manajemen dengan kegiatan yang sangat spesifik untuk mencapai tujuan visi, tujuan, dan sasaran dari rencana tersebut.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak diujung timur Jawa Timur dan memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak salah satunya adalah wisata pantai. Menurut Kantor Pariwisata (dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, 2012) disebutkan bahwa “Perencanaan Kawasan Pantai Selatan Menyimpan Potensi Unggulan yang Luar Biasa Jika Dikembangkan Sebagai Wisata Bahari”. Beberapa kawasan wisata unggulan Jember yang layak dikembangkan dan memiliki potensi besar, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Pantai Paseban

Dengan karakter pantai pasir hitam, ombak besar cocok untuk surfing, pasir hitam dapat menyembuhkan penyakit rematik seperti di Pantai Sanur Bali. Hampan pasir yang luas mirip Pantai Parang Tritis Yogyakarta dan sangat tepat digunakan sebagai Puli sehat. Selain itu Pantai Paseban juga biasa digunakan sebagai Pusat kegiatan Agama Hindu lebih dari 1000 orang pada acara upacara Ngaben, Nyepi dan Upacara lainnya.

b. Pantai Puger

Pantai Puger terkenal dengan keindahan pantai, ombak dan kehidupan nelayan. Pantai Puger memiliki potensi sebagai tempat surfing internasional dan mendapat apresiasi baik para surfer dari Bali dan Australia, kelebihan tempat surfing Puger adalah ombak dapat mencapai bibir pantai dan dapat di lihat langsung para penonton dan pengunjung, disisi lain terdapat perahu nelayan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) terbesar di Jatim bagian timur. Perpaduan antara perahu nelayan, aktifitas surfing dan dukungan alam berupa pulau-pulau kecil sekitarnya member nilai tambah pengembangan kawasan wisata selatan Kabupaten Jember. Produk wisata yang unggulan yang dapat dimunculkan di Pantai Puger yaitu wisata surfing dan wisata budaya nelayan. Untuk itu Puger dapat

dibangun pondok wisata khususnya museum ikan dan museum surfing yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar khusus untuk menyenangkan wisatawan.

c. Pantai Watu Ulo

Pantai Watu Ulo merupakan pencitraan maksimal karena variasi produk wisata sudah terbentuk kuat dalam perilaku wisata. Produk yang dikembangkan juga sangat bervariasi. Pantai Watu Ulo, yang memiliki sekumpulan bebatuan yang menjorok ke laut menyerupai ular besar sedang menuju ke laut. Pantai Watu Ulo cukup luas hingga menuju kawasan timur ke daerah perkampungan nelayan (Payangan). Kawasan payangan ini tidak kalah indah dibandingkan dengan Pantai Watu Ulo karena selain daerah nelayan, kawasan ini terdapat bukit kecil di tengah laut yang sangat indah bila dipandang. Model wisata yang di kembangkan di pantai Watu Ulo adalah wisata bahari, olah raga bahari, child bahari, family bahari dan marine fishing. Untuk mendukung pengembangan maksimal wisata pantai Watu Ulo maka *Community based Tourism* (CBT) yaitu pariwisata kawasan selatan adanya keterlibatan penuh masyarakat sekitar dalam membangun, mencitrakan, peduli dan partisipasi positif aktif dalam menerima kehadiran industry dari wisatawan.

d. Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) dapat menjadi pusat pelayanan wisatawan yg berkunjung ke Watu Ulo. Keuntungan maksimalnya adalah ada diantara kawasan wisata tersebut. Maka dari itu pengembangan maksimal ada dikawasan Pantai Papuma dan Kawasan Watu Ulo menjadi kawasan pengelolaan satu manajemen guna menghindari kesan negatife di masyarakat dan wisatawan karena double redistribusi selama ini menyebabkan pengembangan dua tempat wisata ini saling bersaing tidak sehat dan kurang sinergi serta kurang terpadu, padahal dalam pariwisata tidak mengenal parsial tapi simultan (pegembangan satu pintu dan terpadu).

e. Pantai Bandi Alit merupakan pantai yang letaknya di wilayah Taman Nasional Meru Betiri. Keunggulan pantai ini dapat dimunculkan berupa

wisata bahari Pantai Bandi Alit. Pantai merupakan produk wisata minat khusus yang tetap dan perlu ikut direncanakan, baik fisik maupun non fisik kedepan. Model produk wisata yang dikembangkan adalah wisata bahari dan ecotourism yang terbatas pada wisata Edukas, riset dan kesehatan. Berbagai potensi pendukung pantai Bandi Alit sangat cocok untuk selancar dan surfing. Disamping itu potensi belajar yang cukup besar dapat memungkinkan pantai Bandi Alit sebagai kawasan wisata alternatif peningkatan kualitas penelitian dan belajar siswa Jatim dan Indonesia keseriusan pihak Taman Nasional mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Berkaitan dengan hak itu, pengembangan jalan, jembatan, penginapan, edukasi, dan penelitian sangatlah dibutuhkan beserta fasilitasnya.

Pengelolaan potensi pariwisata tersebut tentunya akan memberikan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, melestarikan adat-istiadat dan budaya masyarakat dan tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabuapten Jember. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi pariwisata sebagai sumber penerimaan daerah harus dikembangkan dengan mendorong kreativitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan kesuatu daerah tentunya sangat didukung oleh produk dan promosi yang bagus, kebijakan pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah yang terencana dan didukung oleh masyarakat. Salah satu indikasi keberhasilan pengembangan pariwisata di kabupaten Jember adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Berikut data kunjungan wisatawan Kabupaten Jember tahun 2012-2016.

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Jember tahun 2012 – 2016

No	Jenis Wisatawan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wisatawan Mancanegara	1.682	1.869	2.672	3.017	2.751
a.	Menginap di akomodasi (orang)	1.123	1.157	1.829	2.198	2.308
b.	Pengunjung ODTW (orang)	559	712	843	819	443
c.	Lama Tinggal rata-rata (hari)	2,75	2,36	2,18	2,24	
2.	Wisatawan Nusantara	740.615	828.368	917.528	1.052.777	1.299.482
a.	Menginap di Akomodasi (orang)	211.179	241.460	273.458	303.135	294.944
b.	Pengunjung ODTW (orang)	529.436	586.908	644.070	749.642	1.004.538
	Jumlah	742.297	830.237	920.200	1.055.794	1.302.233

Sumber: data diolah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, (2017)

Berdasarkan tabel di atas kunjungan wisatawan ke kabupaten jember selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat dari jumlah total kunjungan wisatawan pada tahun 2016 mencapai 1.302.233. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor wisata di Kabupaten Jember menimbulkan efek positif pada pemerintahan Kabupaten Jember untuk lebih mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Jember.

Pantai Pancer merupakan objek wisata Pantai Puger mampu bersaing dengan objek wisata lain dan dapat dijadikan sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Jember khususnya di Desa Puger Kulon. Pantai Pancer adalah sebuah pantai yang berada di Kabupaten Jember tepatnya di desa Puger Kulon. (<http://desapugerkulon.blogspot.co.id/p/potensi-desa.html>. diakses pada tanggal 18 mei 2017 pukul 20.30 WIB). Keberadaan wisata Pantai Pantai Pancer telah meningkatkan pendapatan asli desa. Berikut data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puger Kulon Tahun 2016.

Tabel 1.2 APBD Desa Puger Kulon Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
Pendapatan	1.846.210.726	
Pendapatan Asli Desa	227.162.500	
Hasil Usaha	-	
Hasil Aset	210.162.500	
Sewa tanah kas desa	210.162.500	TKD
Pasar Desa	-	
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5.000.000	SWADAYA
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah(WISATA)	12.000.000	WISATA

Sumber: data diolah dari APBDes Desa Puger Kulon, (2016)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli desa yang berasal dari Pantai Pancer pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.0000.000. Oleh karena itu perlu adanya usaha pengembangan yang berkelanjutan dan menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk lebih memperkenalkan objek wisata ini kepada masyarakat sehingga nantinya jumlah wisatawan di Pantai Puger akan lebih meningkat lagi. Selama ini pemerintah daerah belum pengembangan wisata di Pantai Puger secara optimal sehingga pemerintah desa berinisiatif untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata tersebut. Seperti wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nur Hasan selaku Kepala Desa Puger Kulon.

“Pada Tahun 2013 sampai sekarang dilakukan pengembangan obyek wisata Pantai Pancer yang sebelumnya terbengkalai dan belum dilakukan pengembangan. Karena banyak pengunjung datang ke Pantai Pancer akhirnya kami selaku pemerintah desa pada tahun 2017 berinisiatif untuk melakukan pengembangan khususnya pelebaran lahan parkir untuk memfasilitasi pengunjung yang menggunakan mobil agar lebih mudah untuk menikmati keindahan pantai ini sedangkan untuk sarana prasarananya masih belum ada soalnya dananya masih kurang”. (wawancara 20 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengembangan wisata Pantai Pancer sebelum tahun 2013 terbengkalai baru pada tahun 2017 pemerintah desa melakukan pengembangan khususnya pelebaran lahan parkir untuk memfasilitasi pengunjung yang menggunakan mobil agar lebih mudah untuk menikmati keindahan pantai ini sedangkan untuk sarana prasarananya masih belum ada soalnya dananya masih kurang.

Pernyataan diatas diperkuat dengan wawancara pada Bpk. Zaenal Arifin (Ketua Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Puger) sebagai berikut.

“Infrastruktur menjadi prioritas utama di tahun 2017 dalam pengembangan objek wisata pantai pancer ini, karena untuk membangun opini masyarakat yang didukung oleh LSM dan diharapkan mampu mempercepat proses pengembangan obyek wisata pantai pancer. Pengembangan ini dilakukan sudah lama tapi sifatnya yang real mulai terpilihnya Bpk. Nur Hasan sebagai kepala desa puger kulon. Mulai dari air bersih beliau mengupayakan masuk ke area pantai pancer. Untuk pinggiran pantai di uruk atau pelebaran lahan parkir untuk memfasilitasi pengunjung yang menggunakan mobil agar lebih mudah untuk menikmati keindahan pantai ini..”
(Wawancara, 20 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB).

Dalam penyelenggaraan program pengembangan obyek wisata, salah satu factor keberhasilannya adalah kinerja kepala desa, kinerja tersebut dapat terlihat dari masuknya air bersih, pengurukan atau pelebaran lahan parkir untuk mendukung kenyamanan pengunjung untuk menikmati keindahan pantai.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas mengenai pentingnya pengembangan objek wisata, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata pantai pancer sebagai aset desa puger kulon, maka peneliti akan membahas judul **“Kelembagaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atas suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan peneliti terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena.

Berbeda dengan masalah, rumusan masalah diartikan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sugiyono, (2001:35). Dari pemahaman yang diperoleh, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kelembagaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Faisal, (1992:29). Tujuan penelitian merupakan terget yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21)

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian diatas. Peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya adalah “Untuk Mengetahui Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sebuah suatu manfaat menjadi hal yang wajib ada setelah penelitian dilakukan. Jika manfaat tidak diketahui maka penelitian akan menjadi tidak berguna bagi orang yang ada di sekitarnya. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:21) memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Manfaat penelitian yang ada berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut.

1. Bagi akademis

Peneliti berharap penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi dan rekomendasi untuk penelitian sejenis berikutnya dan sebagai ilmu pengetahuan khususnya mengenai Ilmu Administrasi Negar.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi Pemerintah dan masyarakat terkait Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

3. Penulis

Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan dalam mempraktekkan teori- teori yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kosep Dasar

Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam pembangunan proporsi dan teori. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam konsep dasar inilah, peneliti mampu membuat alur berfikir dan menjadi kerangka berfikir. Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menjawab sebuah fenomena sosial.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori- teori mengenai kegiatan publik yang terkait dalam pengembangan objek wisata pantai pancer di desa puger kulon kabupaten jember yaitu meliputi.

- a. Desa dan Pariwisata
- b. Pariwisata dan Pengelolaannya
- c. Kelembagaan

2.2. Desa dan Pariwisata

2.2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan daerah otonom yang berada diurutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Menurut Nurcholis (2011: 2) Desa adalah satu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling menngenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama, dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik di sawah ataupun

kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relative homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan system nilai social-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*). Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, sehingga percepatan pembangunan di desa tergantung kepada penyelenggaraan pemerintah. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang lebih banyak dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui hak dan kewajiban, maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur hak dan kewajiban desa pada pasal 67 adalah sebagai berikut.

Pasal 67

1. Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.

2. Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Menurut Soetardjo 1984: 182-251 (dalam Nurchilos 2011:20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32/ 2004)

2.2.2 Pengertian Pariwisata

Yoeti (1990:21) mengemukakan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha atau mencarinfakah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam.

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Machintos (1980:8) dalam I Gede dan Ketut (2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas

setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis ini dan pengunjung lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan telah mengatur definisi dasar dari kepariwisataan sebagai berikut.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan dan Negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- d. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pariwisata terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Menurut jumlah orang yang bepergian, dibedakan menjadi dua:
 - a. Pariwisata individu
 - b. Pariwisata rombongan
2. Menurut maksud bepergian, dibedakan menjadi lima:
 - a. Pariwisata rekreasi atau santai
 - b. Pariwisata budaya
 - c. Pariwisata pulih sehat

- d. Pariwisata sport
- e. Pariwisata temu wicara
3. Menurut alat transportasi, dibedakan menjadi tiga:
 - a. Pariwisata darat (bis, mobil pribadi, kereta api)
 - b. Pariwisata tirta (laut, danau, sungai)
 - c. Pariwisata dirgantara
4. Menurut letak geografis, dibedakan menjadi tiga:
 - a. Pariwisata domestik nasional, menunjukkan arus wisstaw yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas disana, yang terbatas dalam suatu Negara tertentu.
 - b. Pariwisata regional, yakni kepergian wisatawan terbatas pada beberapa Negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata, misalnya perjalanan wisatawan di Negara-negara Eropa Barat.
 - c. Pariwisata Internasional, meliputi gerak wisatawan dari suatu Negara ke Negara lain di dunia.
5. Menurut umur (umur membedakan kebutuhan dan kebiasaan):
 - a. Pariwisata remaja
 - b. Pariwisata dewasa
6. Menurut jenis kelamin:
 - a. Pariwisata pria
 - b. Pariwisata wanita
7. Menurut tingkat harga dan tinngkat nasional
 - a. Pariwisata taraf Lux
 - b. Pariwisata taraf Menengah
 - c. Pariwisata taraf Jelata

Didalam pengelolaan pariwisata, perlu adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Menurut Yoeti (1990:12) ketiga sarana yang dimaksudkan adalah.

- a. Sarana pokok kepariwisataan

Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada lallu lintas wisatawan. Fungsinya adalah menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Sarana semacam ini harus diadakan, pembangunannya harus diarahkan apalagi dalam rangka menarik lebih banyak wisatawan.

b. Sarana perlengkapan kepariwisataan

Sarana perlengkapan kepariwisataan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat atau daerah yang dikunjunginya.

c. Sarana penunjang kepariwisataan

Sarana penunjang kepariwisataan adalah fasilitas yang diperlukan wisatawan, yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ditempat yang dikunjungi tersebut.

Wisatawan yang berujung tentu juga akan menikmati potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah objek wisata. Potensi Kepariwisataan adalah kemampuan dalam satu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Sujati, 1989). Sementara itu Soekadji (1996;50) mengemukakan tiga modal potensi kepariwisataan yaitu.

- a. Modal dan potensi alam, yang dimaksud dengan alam disini adalah alam fisik, fauna dan flora. Meskipun sebagai atraksi wisata, ketiganya selalu berperan secara bersama-sama akan tetapi salah satu yang menonjol perannya.
- b. Modal dan potensi kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam arti yang luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau peri kehidupan keratin dan sebagainya, akan tetapi juga adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- c. Modal dan potensi manusia, manusia dapat menjadi atraksi wisata dan dapat menarik kedatangan wisatawan.

Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd dan Wanhill dalam Sunaryo (2013:159) penyusunan kerangka pengembangan sebuah destinasi pariwisata harus mencakup komponen-komponen utama destinasi pariwisata yang meliputi berikut ini:

a. Objek dan Daya Tarik (*Atractions*)

Pengembangan daya tarik utama yang bisa berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun budaya/*artificial*, yang dapat berupa even pertunjukan maupun minat khusus (*special interest*).

b. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Pengembangan sarana atau sistem transportasi yang dapat memudahkan wisatawan menuju destinasi wisata yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan stasiun serta moda transportasi yang dibutuhkan.

c. Amenitas (*Amenities*)

Pengembangan fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan, *retail*, penginapan, toko cendera mata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata serta fasilitas pendukung lainnya.

d. Fasilitas Pendukung (*Ancillary Services*)

Pengembangan fasilitas pendukung yang dibutuhkan wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sebagainya.

e. Kelembagaan (*Institution*)

Pengembangan masing-masing unsur atau *stakeholder* dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*).

Pengembangan destinasi pariwisata yang baik menurut Hardinoto (1996:29) haruslah memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengembangan destinasi pariwisata harus patuh pada perencanaan dan pengelolaan lingkungan, dengan mempertimbangkan keadaan baik dari penduduk setempat yang sering diharuskan menerima arus besar wisata tanpa

mempunyai suara terhadap pengembangan itu;

2. Pariwisata tidak hanya dibiarkan berkembang pada kekuatan pasar pariwisata, tetapi harus direncanakan berhati-hati pada tingkat nasional, regional dan lokal. Memperhatikan dua hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata bukanlah hal yang sederhana. Pengembangan destinasi pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pasar dan harus memperhatikan warga di sekitar destinasi pariwisata sehingga menunjukkan bahwa diperlukannya kolaborasi dari berbagai pihak dalam usaha pengembangan destinasi pariwisata. Berbagai pihak tersebut tentunya tidak terlepas dari pemerintah, masyarakat terutama masyarakat di sekitar destinasi wisata dan bisa pula lembaga nonpemerintah.

Berdasarkan pengertian desa dan pariwisata diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa dan pariwisata memiliki suatu komponen yang dapat dipadukan dalam kemajuan sebuah objek wisata. Keterkaitan antara desa dan pariwisata sangat berpengaruh dalam berbagai hal antara lain pengembangan objek wisata yang berkelanjutan, memberikan peluang usaha untuk masyarakat sekitar, menambah pendapatan asli desa. Oleh karena itu, pariwisata harus dikelola dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.

2..3 Pariwisata dan Pengelolaan

Pengelolaan adalah istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu ntuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud yang sama. Sebagaimana Prajudi (1990) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang merupakan suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton (dalam Westra, 1983:14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasi, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif, material, dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat (1989:30) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Selanjutnya Soekanto (1986:19) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Hamalik, (1993:18) istilah pengelola identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (1993:8) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelola merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Handoko (1999:15) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penentuan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan dalam suatu organisasi.

Lembaga Administrasi Negara (1999:9) merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan, dan penentuan aparat pelaksanaan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk mencapai tujuan.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam unsur perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah;

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan The Liang Gie et, al (1989:210). Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo (1995: 98) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Rahrjo Adisasmito (1990:58) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan suatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.

Siagian, S.P (1984:22) mengemukakan bahwa penggerakan adalah keseluruhan proses motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985:46) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Lebih lanjut Westra, dkk (1989:210) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya dimulai.

3. Pengawasan

Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu, tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko (1999:147) pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto (1989) mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.

Selanjutnya Kontz dan O'Donnel yang dikutip oleh Prajudi Admosudirjo (1973:147) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Firman B. Aji dan Marti Sirait (1990:162) mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan.

2.3.3. Model Pengelolaan berbasis Komunitas

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di lokasi yang menjadi tujuan (destinasi) wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam

pembangunan kepariwisataan ke depan. Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Sinclair (1998) dalam Sugi Rahayu, dkk (2015:24) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional. Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam, pariwisata (Sunaryo, 2013:217).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013:219) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan

memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut: 1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. 2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada. 3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Tradisi budaya dan setting kehidupan desa yang alami justru seringkali menjadi suguhan yang menarik para wisatawan, karena mereka selalu mencari hal baru yang berbeda, setidaknya dari tempat asalnya. Kalau para wisatawan mancanegara lebih tertarik untuk mengenal dan memahami tradisi budaya komunitas setempat dan kehidupan asli komunitas daripada keindahan alamnya, maka hal itu dikarenakan mereka ingin menjalin komunikasi budaya sebagai bagian pengembangan diri. Tambahan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh melalui objek wisata tertentu merupakan fenomena baru yang berusaha menggabungkan aspek keindahan alam dan keunikan budaya tertentu.

Suansri (2003) menyebutkan beberapa prinsip dari Community-Based Tourism yang harus dilakukan, yaitu: 1) mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata; 2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, 3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan; 4) meningkatkan kualitas kehidupan; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal; 7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya; 8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat; 10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat; dan 11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa Community-Based Tourism (CBT) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (mass tourism). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa Community-Based Tourism (CBT) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (mass tourism). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

2.4 Konsep Kelembagaan

2.4.1 Definisi Kelembagaan

Menurut Stiglitz (1986), “kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*)”. (sumber: <http://www.journalipb.ac.id/index.php/jmht/artclediacses> 22maret2016)

Ruttan dan Hayami (dalam Djogo *et al*, 2003:3) mengatakan, “kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan”.

Definisi kelembagaan menurut North (1990:3), “*Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human exchange, wheter political, social, or economic.*” (kelembagaan adalah aturan main di dalam sebuah masyarakat, atau yang lebih formal, adalah kemanusiaan yang direncanakan untuk memaksa sehingga membentuk hubungan interaksi antara manusia. Di dalam konsekuensi struktur insentif mereka pada pertukaran manusia, baik politik, sosial atau ekonomi). Kelembagaan adalah aturan main yang digunakan untuk membentuk interaksi antara manusia di dalam masyarakat atau organisasi. “Dua komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan (*rules of the game*) dan organisasi (*players of the game*). Keduanya sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi” (Nugroho, 2010:118-125). Menurut North (1990:7), “....organisasi dibuat untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kesempatan, dan organisasi disusun untuk merubah kelembagaan”. Kelembagaan merupakan panduan bagi interaksi manusia, kelembagaan dibagi menjadi dua yaitu kelembagaan formal dan kelembagaan informal sesuai dengan pendapat North (1990:4), “*are institutions formal or informal ? ... informal constraints – such as ruler that human being devise – and in informal constraints such as conventions and codes of behavior.*”

Menurut Hodgson (Maret, 2006), “tidak ada kesatuan pendapat mengenai definisi kelembagaan”. Definisi kelembagaan di atas merupakan konsep yang menurut pendapat penulis memiliki definisi sesuai dengan dalam pengelolaan obek wisata pantai pancer.

2.4.2 Aspek Kelembagaan

Menurut Syahyuti (2003), “dua komponen penting dalam kelembagaan yaitu aspek kelembagaan (*social institution*) dan aspek keorganisasian (*organizational aspect*). Aspek kelembagaan (*social institution*) yang memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma, dan *rule* di belakangnya; serta aspek keorganisasian (*organizational aspect*) yang memfokuskan

kepada kajian struktur dan peran.” Binswanger dan Ruttan (1978:329) dalam Syahyuti (2003) mengemukakan pandangan, “*An institution is usually defined as the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship. An organization is generally seen as a decision making unit—a family, a firm, a bureau—that exercise control of resources..... the concept of institution will include that of organization*”. (sebuah kelembagaan biasanya diartikan sebagai seperangkat aturan kebiasaan yang menentukan sebuah pola yang istimewa pada bagian dan hubungan. Sebuah organisasi adalah pada umumnya terlihat sebagai sebuah unit pembuatan keputusan—sebuah keluarga, sebuah firma, sebuah kantoryang mana terdapat tugas pengendalian pada sumberdaya.....konsep tersebut pada kelembagaan akan termasuk di dalam organisasi). Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi bagian teknis yang penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan. Menurut Knight (1952:51) dalam Syahyuti (2003), “*The term institution has two meanings One type ... may be said to be created by the „inveisible hand“□.The other type is of course the deliberately made....*”. (inti dari kelembagaan memiliki dua arti...jenis pertama...mungkin dikatakan dibuat oleh tangan yang tidak nampak....jenis lainnya yang pasti dengan sengaja dibuat...)

Kelembagaan memiliki dua bentuk yaitu, sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat, serta yang datang dari luar yang sengaja dibentuk. Sementara, bagi Uphoff (1986) dalam Syahyuti (2003), “apa yang datang dari luar ini disebut dengan organisasi.” Sedangkan menurut Syahyuti (2003), “terbentuknya

kelembagaan dibedakan menjadi dua cara yaitu kelembagaan tradisional dan kelembagaan introduksi. Kelembagaan tradisional adalah kelembagaan yang terbentuk secara alamiah, dimana aspek-aspek kultural lebih dulu terbentuk dibandingkan aspek-aspek strukturalnya. Sedangkan kelembagaan intoduksi dibentuk melalui rekayasa sosial, dengan mendahulukan pembentukan struktur dan pengurusnya saja (aspek struktural).” “Rekayasa sosial (*social engineering*) pada prinsipnya berupaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Dengan kata lain, rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*). Dalam rekayasa sosial diupayakan kiat-kiat dan strategi-strategi untuk menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih baik” (Ramadhan, 2013). Menurut Rahmat (2000:55) dalam Ramadhan (2013:84), “rekayasa social dilakukan karena munculnya problem-problem sosial. Problem sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya, yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*)”. Kelembagaan merupakan kunci untuk memahami sebuah perubahan dan perkembangan masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh North (1990:3), “*Institutional change shapes the way societies evolve through time and hence is the key to understanding historical change*”.

Dalam penelitian ini kelembagaan disintesis melalui struktur dan peran organisasi serta kebijakan (aturan formal). Keterkaitan antara kebijakan public dengan lembaga pemerintah (organisasi) sebagai organ pelaksana dari kebijakan tersebut dapat dianalisis dengan model institusional yang dikemukakan oleh Dye (Santosa, 2009). Dalam model institusional, Dye menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut dapat diangkat, dilaksanakan, dan diperkuat oleh lembaga pemerintah. Model institusional menonjolkan spesifikasi dari lembaga pemerintah seperti strukturorganisasi, peran, tugas, dan fungsi.

Dye dalam Santosa (2008), menjelaskan tiga karakteristik yang diberikan organisasi pemerintah mengenai kebijakan publik, yaitu (1) pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan, (2) kebijakan pemerintah melibatkan

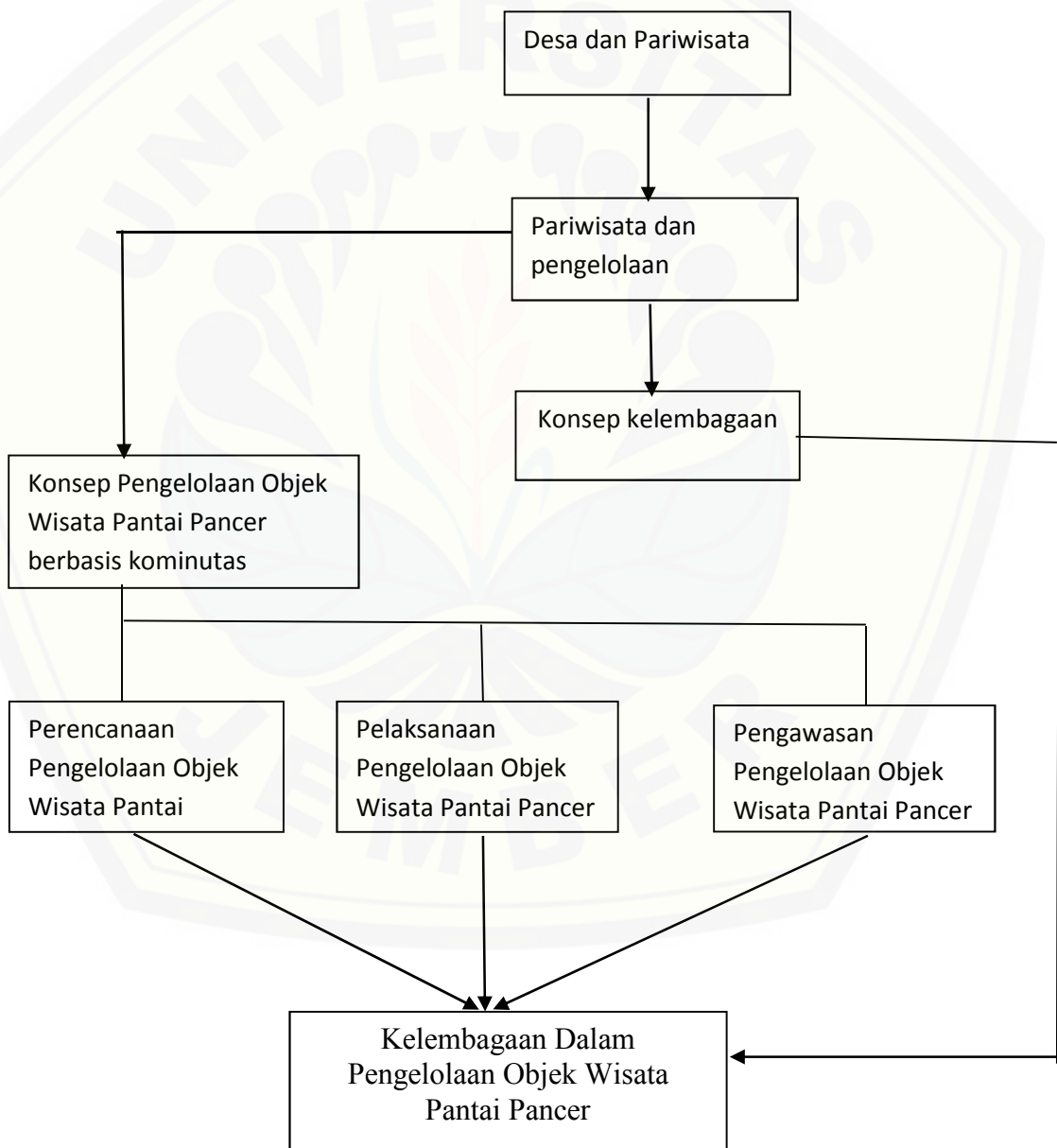
aspek universalitas, (3) pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.

2.4.3 Lapis Kelembagaan

Deliarnov (2006) mengemukakan tiga lapis kelembagaan yaitu, (1) kelembagaan sebagai norma, (2) kelembagaan sebagai aturan main, dan (3) kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan. Gohler dan Bruns dalam Deliarnov (2006:106) mendefinisikan kelembagaan secara umum sebagai norma: *“institutions are patterns of recurrent in a manner conditioning the behavior within the institution, shaping a particular value or set of value and projecting value(s) in the social system in terms of attitudes or acts”* Deliarnov (2006) menjelaskan bahwa, “kelembagaan sebagai norma dan konvensi lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama”. Kelembagaan lapis kedua menurut Deliarnov (2006) adalah kelembagaan sebagai aturan main, yang mana menurut Bogason dalam Deliarnov (2006) menyebutkan bahwa kelembagaan sebagai aturan main memiliki tiga level aturan yaitu, (1) level aksi (aturan mempengaruhi aksi yang nyata), (2) level aksi kolektif (aturan ditetapkan untuk aksi pada masa-masa mendatang biasanya aturan pada level ini disebut sebagai kebijakan), dan (3) level konstitusi didefinisikan sebagai pendiskusian prinsip-prinsip pengambilan keputusan kolektif pada masa yang akan datang, seperti misalnya prinsip demokrasi. Lapis kelembagaan ketiga adalah hubungan kepemilikan, Deliarnov (2006) menjelaskan bahwa kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur individu atau kelompok pemilik, objek nilai bagi pemilik dan orang lain, serta orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan.

2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kelembagaan dalam pengelolaan objek wisata pantai pancer di desa puger kulon kabupaten jember. Berikut ini kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Peneliti. *Sumber:* Peneliti

BAB 3. METODELOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri peneliti sendiri maupun pihak yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:22) metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri serta rincian yang jelas. Pada metodologi penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan.

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena metode penelitian berguna sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jika diibaratkan masalah penelitian adalah daging yang akan dipotong maka kita memerlukan alat yang tepat untuk memotong daging tersebut. Begitu pula dengan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian data dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Juliansyah Noor (2011:34) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Sementara itu menurut Usman & Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual dan akurat tentang fakta- fakta dan sifat- sifat populasi tertentu.

Menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20) penelitiann kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi. Dari penjelasan definisi tersebut peneliti ingin berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian sangatlah penting hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Penentuan tempat dan waktu dalam sebuah penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian.

Penelitian ini mengambil peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata pantai pancer kecamatan puger kulon kabupaten jember sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Wisata Pantai Pancer merupakan salah satu objek wisata yang pengunjungnya semakin meningkat per tahunnya.

- b. Wisata Pantai Pancer merupakan salah satu objek wisata memiliki daya tarik wisata yang tinggi di Kabupaten Jember
- c. Wisata Pantai Pancer memiliki potensi wisata untuk dikembangkan menjadi salah satu wisata unggulan
- d. Pengembangan objek wisata Pantai Pancer menjadi prioritas dari tahun 2013 oleh pemerintah desa Desa Puger Kulon.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-November 2017.

3.3 Data dan Sumber Data

Data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang pemecahan masalah penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses- proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Pengertian sumber data menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Selain itu, menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand informan*" dan data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber- sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu Pengembangan Objek Wisata Pantai Pancer Desa Puger Kulon Kabupaten Jember dari hasil observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota kepada Desa, dan data-data terkait, pemerintah daerah melimpahkan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan objek wisata, dan dokumentasi terkait bagaimana kelembagaan pengelolaan objek wisata pantai pancer di desa pugur kulon kabupaten jember.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Morse dalam Denzin K (1978:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat antikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.

- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikan sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas informan yang dipilih peneliti dalam penelitian terkait yaitu kelembagaan dalam pengelolaan objek wisata pantai pancer di desa puger kulon adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Desa di Desa Puger Kulon Bapak Nur Hasan
- b. Ketua Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Bapak Zainal Arifin
- c. Tokon Pemuda di Desa Puger Kulon Bapak Yanto
- d. Ketua Pokdarwis dan Komunitas Puger Bagus Bapak Mulya Cahya

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:233) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data berbeda-beda sesuai padamacam penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses dan lain- lain. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2010:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Menurut Burns dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 93), observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Dengan teknik observasi ini peneliti akan mengamati apa yang terjadi dilokasi penelitian, mengamati proses- proses dan peristiwa yang terjadi dan mempelajari data atau dokumen yang dimiliki oleh lembaga terkait.

2. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen. Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 159), dokumen atau record adalah sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting sedangkan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa peraturan perundang- undangan, data peningkatan pengunjung, dan rekaman serta dokumentasi lainnya yang dapat menunjang data penelitian.

3. Wawancara

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 127) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak yaitu sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 18) wawancara dibagi menjadi.

- a. Wawancara oleh tim atau panel.
- b. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka (covert dan overt).
- c. Wawancara riwayat secara lisan.
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Menurut Esterberg (2002) yang dikutip Sugiyono (2011:23) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori yaitu:wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan menurut Iman Gunawan (2013:162) tipe wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlakukan peneliti sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih lues dan terbuka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam- dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.6 Teknik Menguji Keabsaan Data

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsaannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsaan data yang diperoleh harus benar- benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita yang ada. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsaan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsaan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif dituntut untuk ikut serta dilapangan penelitian untuk mendapatkan data hingga tingkat jenuh. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara dalam menguji teknik keabsaan data hal ini karena peneliti mampu mempelajari banyak hal dilangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapat mampu dipercaya atau tidak. Menurut Moleong (2014:327-329) perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks dan membangun kepercayaan subjek.

2. Ketekunan pengamat

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Menurut Moleong (2004:175) Ketekunan pengamatan

atau keajegan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri atau suatu hal tertentu yang sangat relevan dengan masalah penelitian yang dijalankan secara rinci. Langkah yang ditempuh adalah dengan membaca referensi, browsing, hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan serta valid.

3. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini.

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
2. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara data yang diperoleh. Seperti mencocokkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu narasumber dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber lain atau mencocokkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi maupun observasi.

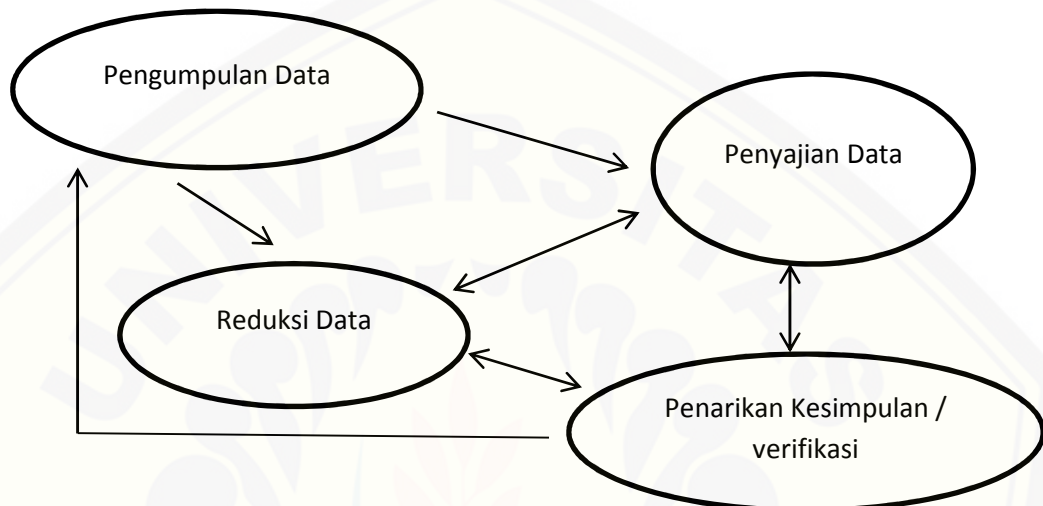
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Boghan dan Biklen dalam Basrowi dan Suwardi (2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menilai data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Basrowi dan Suwardi (2008:192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, data untuk menjawab dua pertanyaan

pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data- data ini, dan (2) seberapa jauh data- data ini dapat menyongkong tema tersebut.

Miles dan Huberman (2007:16) dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman (2007:16) dikutip dari Prastowo (2012:241), reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pyoyek yang diorientasikan berlangsung. Reduksi data sudah tampak ketika penelitian memusatkan kerangka konseptualwilayah penelitian, permasalahan penelitiandan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisipasi dan menulis memo). Reduksi data berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan- kesimpulan akhirnya

dapat ditarik atau dapat diverifikasi. Pada penelitian ini data- data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data- data yang berkaitan dengan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pancer Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data digunakan untuk lebih mengingat pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam beberapa bentuk seperti teks naratif, gambar, dan bagan..

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penerikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab berdasarkan hasil analisis data (Imam Gunawan, 2013: 212). kesimpulan sajian dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. kesimpulan yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Kesimpulan yang mengungkapkan Kelembagaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kelembagaan dalam pengembangan objek wisata pantai pancer di desa puger kulon kabupaten jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Dari segi pengelolaan pancer masih belum ada nilai – nilai yang tertulis menunjukkan pemerintah desa berhak mengelola pantai pancer dengan menunjuk salah seorang koordinator pengelola di objek wisata pantai pancer.

5.1.2 Dari segi struktur organisasi, masih belum memiliki struktur organisasi yang jelas, hanya sebatas perintah dari pihak atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pengelolaan yang ada di pantai pancer.

5.1.2 Dari strategi pengembangan atau program pariwisata pantai Puger mempunyai daya tarik wisata yaitu akses untuk menuju objek wisata, adanya fasilitas, dan terdapat atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah Desa mempertimbangkan kawasan yang tepat untuk dikembangkan. Desa Puger merupakan kawasan yang strategis untuk dikembangkan, selain itu adanya potensi yang baik, iklim yang baik, dan keadaan yang masih alami menjadi dasar sebagai pengembangan kawasan wisata Pantai pancer. Namun masih belum ada kegiatan yang terstruktur dan kegiatan yang telah dilakukan merupakan keinginan seseorang yang memiliki kekuasaan di pemerintah desa

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait peran pemerintah desa pengembangan pantai adalah sebagai berikut..

1. Pemerintah desa membuat peraturan yang tertulis tentang pengelolaan objek wisata pantai paner dengan memilih anggota-anggota dari komunitas

yang sudah terbentuk yang berkompetensi dalam hal pengelolaan pariwisata.

2. Membuat struktur organisasi dalam pengelolaan pantai pancer sehingga tidak disalah gunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dalam pengelolaan objek wisata pantai pancer.
3. Membuat program – program yang visibel dalam pengelolaan objek wisata pantai pancer, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk membenahi sarana dan prasan yang ada di pantai pancer.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- HAW, Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grasindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta :Kencana.
- Moloeng, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi, edisi 8*. Jakarta: Prentice Hall.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Revika Aditama

Winardi. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Cole, Martin and Parston. 2006. *Unlocking Public Values: A New Model for Achieving High Performance in Public Service Organizations*. New Jersey and etc: John Wiley and Sons

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Barata, Atep Adya.2005. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PTElex Media Komputindo

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Peneletian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2005-2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota kepada Desa

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang- undang (UU) Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004

JURNAL

Rahayu, Sugi, 2015. “Pengebangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewayogyakarta”,Revisi 01:1-159.

Susyanti, Dewi. W, 2013.” Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan”. Ekonomi dan Bisnis, Vol 12: 33-36

Dipayana, Agus, dan I Nyoman Sunarta.2015.” Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya)”, Destinasi Pariwisata, Vol 3:58-66

Amirudin, Akhmad, 2017. “Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu”, Public Sector Innovations, Vol 2: 26-31

INTERNET

<http://www.journalipb.ac.id/index.php/jmht/artclediases22maret2016>pukul

09.37 WIB

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.48 WIB

<http://desapugerkulon.blogspot.co.id/p/potensi-desa.html>. diakses pada tanggal 18 mei 2017 pukul 20.30 WIB)

[http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu no 23 2014/](http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-23-2014/) diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 09.46 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/13460-ID-potensi-desa-melalui-pariwisata-pedesaan.pdf> /diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 14.36 WIB

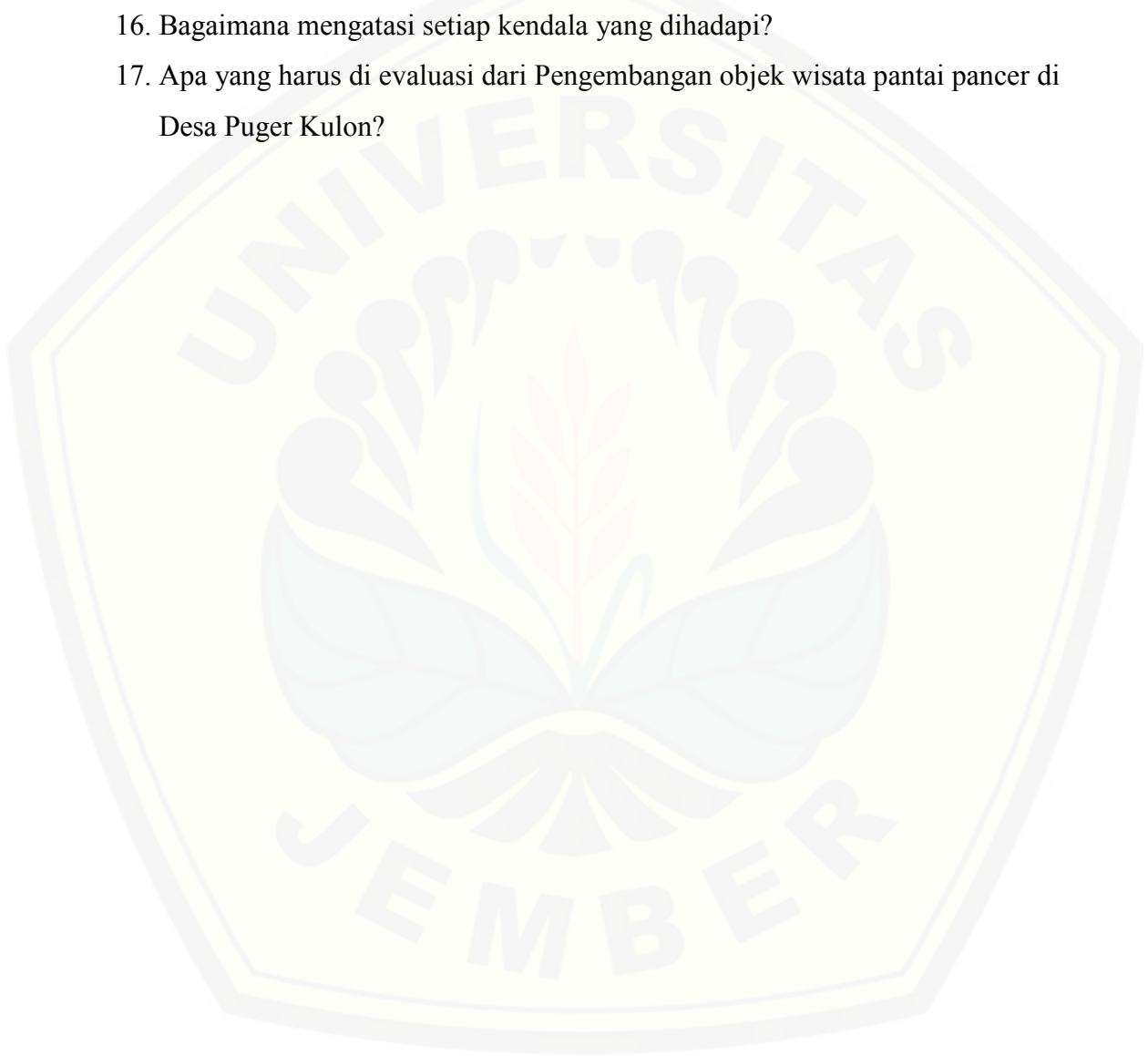
<https://media.neliti.com/media/publications/108405-ID-pola-kemitraan-dalam-pengelolaan-pariwis.pdf> diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 14.36 WIB



PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon merupakan program pemerintah atau kebijakan Desa?
2. Jika program pemerintah, jelaskan? dan peraturan terkait dengan program?
3. Jika kebijakan Desa, siapa yang memunculkan ide Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?
4. Apakah ini menjadi program desa atau lainnya?
5. Apa yang melatarbelakangi Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?
6. Apa saja yang menjadi rencana Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon? kenapa?
7. Bagaimana konsep pengembangan Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon
8. Siapa yang terlibat dalam Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?
9. Apa saja peran dari masing-masing pihak yang terlibat?
 - a. BPD
 - b. Tokoh Pemuda
 - c. Pihak Desa
 - d.
10. Bagaiamanakah peran dari masing-masing pihak pada saat pelaksanaan Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon ?
11. Kapan Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon akan dilakukan?
12. Apakah ada pelaksana dalam Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?
13. Bagaiamanakah respon masyarakat dengan adanya Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon ?

14. Bagaimana alur Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon hingga terlaksana?
15. Apa hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?
16. Bagaimana mengatasi setiap kendala yang dihadapi?
17. Apa yang harus di evaluasi dari Pengembangan objek wisata pantai pancer di Desa Puger Kulon?



GAMBAR OBSERVASI DAN WAWANCARA



Gambar wawancara dengan Bapak Saiful Hoji selaku Sekretaris Desa Puger Kulon



Gambar wawancara dengan Bapak Nur Hasan Kepala Desa Puger Kulon



Gambar wawancara dengan Bapak Mulyo Cahyono selaku Koordinator Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pancer Puger Kulon



Gambar wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Ketua Seksi Kesejahteraan sekaligus Ketua Generasi Muda Gedangan